

MASYARAKAT SAKAI: MENELUSURI JEJAK IDENTITAS SUKU MELAYU KUNO YANG TERLUPAKAN DARI PROVINSI RIAU, INDONESIA

Rika Sari Hasiholan-Sidauruk¹, Rachel Arini Partogi Hasiholan-Sidauruk²,
Anggie Hasiholan-Sidauruk³, Christ Windreis⁴, Freddy Hasiholan Sidauruk⁵

Semua penulis merupakan anggota^{1) 2) 3) 5)} dan anggota kehormatan⁴⁾ Hasiholan Science Explorer dari keluarga Hasiholan-Sidauruk, klan keluarga yang fokus pada penelitian multi bidang. ¹⁾ STIA Lancang Kuning, ²⁾ Biologi F-MIPA, Universitas Riau, ³⁾ SMA Santo Tarcisius Dumai, ⁴⁾ STMIK Dharmapala Riau, ⁵⁾ Lembaga Inovasi dan Kajian Potensi Daerah (LIKPD)
Korespondensi penulis: rikasarihs8@gmail.com

Abstrak

Identitas Sakai akhir-akhir ini telah mulai diakui sebagai masyarakat hukum adat di Provinsi Riau, namun pengakuan tersebut masih bersifat parsial dalam perspektif identitas komunal. Riset ini secara khusus akan menguraikan penelusuran identitas Sakai sebagai identitas kolektif kalangan masyarakat yang memiliki hubungan genealogi dengan masyarakat kuno yang dahulu berdiam di pesisir Sungai Mandau. Penelusuran identitas difungsikan sebagai bahan pertimbangan administratif bagi para pemangku kebijakan di Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis dan kabupaten/kota lainnya yang berhubungan dengan keberadaan Sakai, sekaligus sebagai sarana untuk menguraikan “missing link” pembahasan mengenai keberadaan Sakai yang seharusnya bersambung langsung dalam rangkaian sejarah terkait.

Kata Kunci: Sakai, identitas, sejarah, Riau, Sumatera

Abstract

The Sakai identity has recently begun to be recognized as a customary law community in Riau Province, but this recognition is still partial in the perspective of communal identity. This research will specifically describe the tracing of the Sakai identity as a collective identity of the community that has a genealogical relationship with the ancient community that used to live on the coast of the Mandau River. The tracing of identity functions as administrative consideration for policy makers in Riau Province, Bengkalis Regency and other regencies/cities related to the existence of Sakai, as well as a means to describe the "missing link" of the discussion regarding the existence of Sakai which should be directly connected in the related historical series.

Keywords: Sakai, identity, history, Riau, Sumatra

PENDAHULUAN

Keberadaan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan latar belakang tradisi dengan wilayah adat yang menjadi asal muasal leluhurnya merupakan salah satu sistem sosial masyarakat yang diakui secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45). Dalam konstitusi UUD 45 disebutkan bahwa masyarakat hukum adat ini dapat diakui jika memenuhi persyaratan “hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”, yang dalam kenyataannya justru menimbulkan permasalahan baru. Permasalahan ini khususnya mengenai identifikasi keberadaan masyarakat hukum adat tersebut, oleh sebab sejak kemerdekaan pada tahun 1945 hingga sekarang telah banyak perubahan dalam sistem sosial seiring dengan perkembangan dan dinamika sistem pemerintahan serta dampak migrasi penduduk berikut pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang dahulu memiliki adat, tradisi, dan wilayah dengan masing-masing pranata sosialnya.

Perkembangan dan dinamika sistem pemerintahan di NKRI menyebabkan sistem-sistem sosial masyarakat tempatan harus disesuaikan dengan sistem administrasi pemerintahan yang diatur oleh perundang-undangan. Penyesuaian ini sering kali menyebabkan pranata sosial yang telah ada sebelumnya kemudian berubah atau menghilang agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Di kabupaten Bengkalis, sebagai misal, pranata sosial yang ada dimasa lalu berangkat dari keberadaan kesatuan-kesatuan masyarakat dengan masing-masing wilayahnya yang berbeda satu sama lain. Kabupaten Bengkalis-dahulu merupakan bagian dari Kerajaan Siak Sri Indrapura dan wilayah ini di masa lalu terdapat bentuk-bentuk pemerintahan lokal yang bersifat otonom dengan masing-masing memiliki independensi kebudayaannya sendiri. Dalam Kitab Bab-alkewa'id (kitab undang-undang kerajaan Siak Sri Indrapura yang diterbitkan pada tahun 1898), di wilayah Kabupaten Bengkalis sekarang ini, dahulu terdapat 9 negeri suku yang tunduk ke Provinsi Negeri Bukit Batu dan 2 negeri suku dari Sakai yang tunduk ke Provinsi Negeri Siak Sri Indrapura.

Ke-9 negeri bagian di provinsi negeri di Bukit Batu terdiri atas negeri suku Hamba Raja Dalam, negeri suku Sembilan Suku, negeri suku Hamba Raja Dalam Kenaikan, negeri suku Tjedun, negeri suku Senggoro, negeri suku Akit Selat Murung, negeri Melayu-melayu Selat Murung, dan negeri Bulang. Sedangkan dari provinsi negeri Siak Sri Indrapura terdapat negeri suku Batin Lima Sakai dan negeri suku Batin Delapan Sakai. Kerajaan Siak tidak mengatur atau mengendalikan sistem pemerintahan lokal dan peradatan atau kebudayaan tempatan selama penduduk di kawasan tersebut mengakui dan tunduk atas kedaulatan kerajaan.

Keberadaan kesatuan masyarakat yang disebut Sakai, baik suku Batin Lima Sakai maupun suku Batin Delapan Sakai mulai tergerus identitas dan hak-haknya oleh sebab pesatnya pembangunan nasional yang cenderung mengeksploitasi sumberdaya tempatan tanpa memperhatikan kepentingan setempat. Pertumbuhan ekonomi dan perubahan-perubahan sosial masyarakat akibat pertumbuhan tersebut merupakan faktor pemicu menghilangnya identitas masyarakat adat tempatan. Ketika suatu kawasan, yang sebelumnya merupakan kawasan pemukiman atau ulayat dari masyarakat tempatan, menjadi kawasan pusat aktivitas ekonomi, maka terdapat kecenderungan hak-hak adat masyarakat tempatan terpinggirkan oleh sebab signifikansi mayoritas dari kepentingan ekonomi tersebut, baik dalam konteks kepentingan daerah maupun kepentingan nasional.

Dalam perspektif keberadaan masyarakat adat Sakai di Kabupaten Bengkalis, identitas maupun keberadaan pranata adat, tradisi dan kawasan masyarakat adat sebagian besar tidak diketahui oleh kalangan masyarakat umum dan kalangan pemerintah yang kebanyakan memiliki latar belakang penduduk pendatang. Migrasi dari berbagai daerah di sekitar Kabupaten Bengkalis sejak tahun 1957 yang dipicu oleh keberadaan ladang minyak Caltex di Kecamatan Duri dan pelabuhan minyak Caltex di kota Dumai merupakan salah satu faktor penyebab tergerusnya keberadaan masyarakat adat tempatan. Walaupun demikian, keberadaan masyarakat adat beserta pranata sosialnya di masa lalu masih dapat terlacak sebagai ingatan kolektif pada kelompok-kelompok masyarakat yang masih memiliki hubungan genealogi dengan masyarakat maupun penguasa tempatan yang dahulu berkedudukan di Kabupaten Bengkalis, khususnya di wilayah yang dahulu disebut negeri suku Batin Lima Sakai dan negeri Suku Batin Delapan Sakai.

Dalam konteks pengakuan Sakai sebagai masyarakat hukum adat, Pemerintah Provinsi Riau telah melakukannya melalui Keputusan Gubernur Riau dengan isi yang memuat tentang Pengakuan Hutan Adat Imbo Ayo dan Masyarakat Hukum Adat Suku Sakai Bathin Sebang pada tahun 2022 yang lalu.¹ Pengakuan ini merupakan langkah positif pemerintah provinsi dalam mengakomodir keberadaan masyarakat yang dikenal sebagai Sakai di Provinsi Riau. Namun jika ditinjau berdasarkan keberadaan komunitas Sakai secara keseluruhan, pengakuan ini justru membuat kesan adanya defenisi baru dalam perspektif keberadaan masyarakat dan kebudayaan berbasis Sakai.

Pengakuan Sakai dari Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2022 hanya menyebut suku sakai Bathin Sebang sebagai masyarakat hukum adat sehingga dapat membuat kesan yang keliru mengenai Suku Sakai Bathin Sebang sebagai etnik dengan kebudayaan tersendiri dan berbeda dengan komunitas masyarakat lainnya yang juga dikenal sebagai Sakai. Batin Sebang sendiri menurut Kitab Bab-alkewa'id merupakan salah satu hinduk atau kampung yang menjadi bagian dari negeri suku Batin Delapan Sakai.

¹ Mediacenter Riau. "Keinginan Masyarakat Adat Suku Sakai".

Dalam hal ini, Batin Sebangka merupakan salah satu Batin dari delapan Batin yang dahulu tunduk dibawah Batin Meradjo Lela, kepala suku Batin Delapan Sakai.

Sakai merupakan identitas kolektif dari masyarakat yang dahulu merupakan bagian dari negeri suku Batin Selapan Sakai dan Batin Lima Sakai yang terletak di pesisir sungai Mandau, anak sungai Siak. Untuk itu, kajian ini menguraikan secara khusus konsep-konsep defenitif dari identitas Sakai yang dapat digunakan untuk melengkapi kelayakan administratif negara atas identitas sakai sebagai Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Riau tanpa menimbulkan perpecahan atau distorsi identitas dari ragam komunitas yang dahulu di kenal sebagai Sakai. Selain itu, pengkajian identitas ini juga difungsikan sebagai sarana untuk menguraikan "*missing link*" pembahasan mengenai keberadaan komunitas-komunitas adat dari masyarakat tempatan yang seharusnya berhubungan langsung dalam rangkaian sejarah lokal, nasional maupun internasional.

Kajian ini difokuskan pada pembahasan mengenai konsep identitas yang relevan dengan latar belakang sejarah dari keberadaan istilah "sakai" untuk masyarakat kuno di di pesisir sungai Mandau. Konsep identitas yang telah ditelusuri dan diusulkan dalam kajian ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam memperjelas legalitas eksistensi masyarakat kuno di di pesisir sungai Mandau beserta keturunannya di masa sekarang. Walaupun mengungkit hal mengenai konsep "Masyarakat Hukum Adat", namun kajian ini tidak membahas aspek-aspek legal mengenai Masyarakat Hukum Adat tetapi lebih kepada penguraian keberadaan identitas kelompok masyarakat secara defenitif berdasarkan perspektif kepentingan untuk legalitiasi mereka sebagai Masyarakat Hukum Adat dengan identitas yang dapat dibedakan dengan Masyarakat Hukum Adat lainnya.

METODE

Riset ini secara khusus akan membahas identitas masyarakat hukum adat yang dikenal dengan identitas "Sakai" di Provinsi Riau berdasarkan metode analisis interpretatif dari ragam referensi heuristik historiografi dalam berbagai data referensial sebelum indonesia merdeka. Referensi sebelum Indonesia merdeka digunakan sebagai data heuristik yang merupakan bahan primer analisis, oleh sebab sejak Indonesia merdeka telah terjadi distorsi dalam ingatan kolektif di kalangan masyarakat sakai. Distorsi ini dipicu oleh transisi identitas dari yang semula Sakai ketika mereka masih non-Muslim menjadi Melayu setelah memeluk agama Islam.

Informasi-informasi lanjutan setelah Indonesia merdeka digunakan sebagai bahan sekunder untuk melengkapi kekurangan data dari sumber-sumber sebelum Indonesia merdeka. Namun informasi lanjutan tersebut perlu difilterisasi berdasarkan korelasi fakta heuristik dari ragam catatan pertama mengenai keberadaan Sakai. Fakta heuristik dari ragam catatan pertama berasal dari catatan-catatan sebelum abad ke-20 yang merupakan catatan mengenai ingatan kolektif masyarakat Sakai pada masa itu.

Proses analisis interpretatif dari ragam referensi heuristik historiografi sebelum Indonesia merdeka dilakukan dengan (1) mengumpulkan bukti-bukti heuristik dari ragam ingatan kolektif yang dicatat oleh para penulis dimasa dahulu; untuk kemudian (2) dianalisis korelasi antara ingatan kolektif dengan ragam fakta sejarah tempatan, dan selanjutnya (3) dilakukan penelusuran premis-premis interpretatif dari keterangan-keterangan yang terdapat dalam ingatan kolektif tersebut. Premis didasarkan kepada perspektif interpretasi, korelasi, komparasi, dan atau kontrapretasi pemaknaan kata sebagai petunjuk sejarah (atau dalam hal ini kami sebut dengan istilah metode *historioleksis*) untuk menemukan petunjuk-petunjuk dan fakta yang dapat dianalisis secara konklusif dengan situasi faktual dari ingatan kolektif dalam historiografi. Metode ini dikembangkan oleh Freddy Hasiholan Sidauruk sebagai solusi dalam menemukan jejak-jejak sejarah berdasarkan rekaman ingatan kolektif sebagai petunjuk sejarah dari masyarakat yang tidak memiliki rekaman tertulis dalam internal kultur mereka.

Parameter utama dalam analisis historioleksis adalah konsep-konsep leksikal yang memuat data-data heuristik, terutama catatan-catatan tertua dari ingatan kolektif masyarakat yang menjadi objek penelitian serta masyarakat lainnya yang berhubungan atau hidup berdampingan dengan objek yang diteliti. Rekaman tertua tersebut ditelusuri dari berbagai catatan kuno atau bentuk rekaman tertulis lainnya berdasarkan filterisasi kesesuaian ingatan kolektif dengan fakta-fakta sejarah yang ada pada masa itu, sehingga dapat dibedakan mana data yang merupakan distorsi akibat persepsi dari kondisi isolatif atau kurangnya pengetahuan tempatan dengan data yang layak untuk digunakan sebagai data historiografi.

Data-data heuristik yang dikumpulkan dan difilter berdasarkan konstruksi analisis historiografi dibatasi pada konsep-konsep leksikologi, fonologi dan etimologi dari ragam keterangan heuristik yang dapat dipastikan asal-usulnya, khususnya data rekaman-rekaman keterangan penduduk tempatan pada masa yang diperkirakan masih adanya jejak ingatan kolektif dari masyarakat yang menjadi sumber informasi tersebut. Data heuristik difokuskan kepada kata-kata kunci dari catatan masa lalu yang berhubungan dengan kata Sakai, Mandau, dan istilah lain yang terkoneksi dengan konsep asal-usul keberadaan "Sakai" di Provinsi Riau.

Data heuristik yang digunakan dibatasi pada informasi-informasi yang tercatat pada masa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia untuk menghindari adanya bias informasi akibat distorsi ingatan lokal oleh transisi identitas sebagai bangsa Indonesia pasca kemerdekaan. Masing-masing informasi yang menjadi data heuristik selanjutnya ditelusuri kesesuaiannya sebagai fakta berdasarkan dinamika sejarah yang ada dikawasan tersebut termasuk kawasan-kawasan disekitar objek penelitian, yakni kawasan dimana masyarakat "Sakai" dahulu berdomisili.

Dalam penelusuran lokasi asal-usul, digunakan metode analisis linguistik khususnya analisis etimologi dari istilah atau kata yang digunakan sebagai identitas, serta hubungan istilah tersebut dengan keberadaan ragam data heuristik yang terkait dengan fakta-fakta sejarah pada kawasan-kawasan yang diperkirakan berhubungan langsung atau tidak langsung dengan objek penelitian. Dalam hal ini toponimi hanya difokuskan pada lokasi yang diperkirakan berhubungan dengan sejarah asal-usul dan migrasi "Sakai". Analisis toponimi hanya dilakukan jika diperlukan adanya pembuktian korelatif mengenai asal-usul dari suku tersebut dengan lokasi yang diperkirakan menjadi titik korelasi.

POLEMIK IDENTITAS SAKAI

Keberadaan Suku Sakai pada lokasi yang sekarang disebut Provinsi Riau, berdasarkan keterangan Rijn van Alkemade (1885) maupun Van Anrooij (1885), dikenal sebagai Sakai dari Sungai Mandau.² Kemudian Moszkowski dalam catatannya pada tahun 1909, menyebutkan bahwa sebutan "sakai" merupakan penghinaan besar bagi mereka kala itu dan mereka lebih suka disebut sebagai "orang batin".³

Porath dalam catatannya tahun 2018 memaparkan bahwa penduduk tempatan, dimana ia tinggal pada masa itu, menolak dengan keras istilah "suku terasing" dari pemerintah. Sebaliknya istilah yang mereka gunakan untuk diri mereka sendiri, selain Orang Kampung dan Orang Sakai, adalah Orang Asli.⁴

Perubahan istilah identitas etnik yang terjadi berulang kali di Suku Sakai pada dasarnya merupakan petunjuk mengenai adanya perubahan-perubahan sosial politik dan budaya secara signifikan terjadi pada era tertentu di suku Sakai. Perubahan-perubahan tersebut pada akhirnya menimbulkan banyak distorsi pada ingatan kolektif masyarakat lokal, sehingga pada akhirnya sulit untuk menggunakan informasi lokal sebagai data heuristik karena besarnya resiko distorsi informasi akibat berbagai penyebab "kebingungan" yang dipicu oleh distorsi memori kolektif. Porath (2018) melihat fenomena ini sebagai *cultural amnesia*, terutama ketika berhubungan dengan asal-usul nama "sakai", sehingga pada masa ia meneliti pada tahun 2018, ia menemukan adanya spekulasi salah di beberapa kalangan masyarakat tempatan yang menyebutkan bahwa nama Sakai berasal dari Jepang.⁵

Lebih lanjut, Porath juga menyatakan bahwa setiap Sakai sepenuhnya menyadari bahwa itu adalah eksonim dan umumnya orang tidak tahu mengapa mereka disebut demikian atau dari mana nama itu berasal.⁶ Walaupun demikian, jika keberadaan istilah "sakai" dihubungkan dengan berbagai fragmen sejarah terkait daerah Mandau maupun daerah sekitarnya maka kemungkinan mengenai asal-usul nama "sakai" dapat temukan petunjuknya.

IDENTITAS SAKAI DALAM SEJARAH

Petunjuk awal mengenai keberadaan masyarakat di sungai Mandau dapat ditemukan dalam catatan William Marsden, diterbitkan pada tahun 1811, yang menyebutkan keberadaan daerah yang

² Rijn van Alkemade, "Het Rijk Gassip," 220-1, 235-6; Hijmans van Anrooij, "Nota Omtrent Het Rijk van Siak," 287, 305.

³ Moszkowski, "The Pagan Races of East Sumatra," 708.

⁴ Porath, "The Orang Batin," 289.

⁵ *Ibid*, 289.

⁶ *Ibid*.

disebut Mandau atau Mandol.⁷ Ia mendapatkan nama lokasi ini berdasarkan peta Belanda. Marsden sama sekali tidak menjelaskan keberadaan komunitas masyarakat yang ada di Mandau tersebut, namun penjelasan ini menunjukkan keberadaan daerah di Sungai Mandau telah diketahui oleh bangsa Eropa walaupun pengetahuan mereka tentang masyarakat tempatan masih sangat terbatas.



Gambar 1. Lokasi Mandau menurut Peta Marsden.

Sumber: Marsden, *The History of Sumatra*, 1811.

Keberadaan komunitas Sakai di Sungai Mandau pertama kali dicatat oleh Rijn van Alkemade (1885) dan Van Anrooij (1885). Namun keterangan mengenai sejarah atau asal-usul Sakai hanya dapat ditemukan dalam catatan Rijn van Alkemade, sedangkan Van Anrooij lebih terfokus untuk menerangkan kondisi demografis dan perekonomian tempatan.

Asal-usul Sakai di hulu Sungai Mandau dalam catatan Rijn van Alkemade berhubungan erat dengan keberadaan kerajaan kuno yang disebut dengan kerajaan Gassip. Kerajaan ini dalam catatan Tome Pires (1512) dan kronik Sulalatus Salatin pada abad ke-17 disebut dengan kerajaan Siak,⁸ kerajaan yang telah ada jauh sebelum Kerajaan Siak Sri Indrapura yang berdiri pada awal abad ke-18.

Untuk dapat memperkirakan kapan keberadaan Sakai berdomisili di hulu Sungai Mandau, terlebih dahulu dirujuk keterangan Rijn van Alkemade mengenai asal-usul penduduk Gasib (Siak) sebagai berikut:

Omtrent den oorsprong van de bevolking van het overige Siak ver haalt de overlevering het volgende: Een viertal personen, later bekend onder de namen Datoe Merpoesoën [3], Datoe Sai, Datoe Kelantan en Datoe Merbadak, uit Priang Padang Pandjang (Priaman) afkomstig, trokken naar het tegenwoordige Siak, waar zij zich, de eerste aan de soengei Gassip, de tweede aan de soengei Sai in Senapalan (tegenwoordig Pakan Baroe), de derde aan de soengei Kelantan en de vierde aan de Soengei Merbadak met der woon nederzetten [1]. Deze vier personen worden als de stamvallers van Siak's vorspronkelijke bevolking beschouwd en hunne begraafplaatsen, die in Poelau Lawan, Pakan Baroe, Mandau en Betoeng worden aangetroffen, zijn steeds door de bevolking als heilig (kramat) in eere gehouden. Men zou hen gevoegelijk de hoofden der soekoe's Gassip, Senapalan, Mandau en Betoeng kunnen noemen, naar de streken waar zij zich vestigden.⁹

Mengenai asal usul penduduk Siak selebihnya, tradisi menceritakan sebagai berikut: Empat orang yang kemudian dikenal dengan nama Datoe Merpoesoën [3], Datoe Sai, Datoe Kelantan dan Datoe Merbadak, berasal dari Priang Padang Pandjang (Priaman), pergi ke Siak sekarang, tempat mereka menetap, yang pertama ke Sungei Gassip, yang kedua ke Sungei Sai di Senapalan (sekarang Pakan Baru), yang ketiga ke Sungei Kelantan dan yang keempat bertempat tinggal ke Sungei Merbadak [1]. Keempat individu ini dianggap sebagai nenek moyang dari populasi asli, dan kuburan mereka yang ditemukan di Poelau Lawan, Pakan Baru, Mandau dan Betung, selalu dijunjung tinggi oleh penduduk sebagai keramat (kramat).

⁷ Marsden, *The History of Sumatra*, 355-6.

⁸ Cortesão, *The Suma Oriental of Tome Pires*, 135, 149, 248, 262; Ahmad. *Sulalatus Salatin*, 00.

⁹ Rijn van Alkemade, "Het Rijk Gassip," 219-20.

Mereka mungkin pantas disebut sebagai kepala sukkos Gassip, Senapalan, Mandau dan Betung, sesuai dengan daerah tempat mereka menetap.

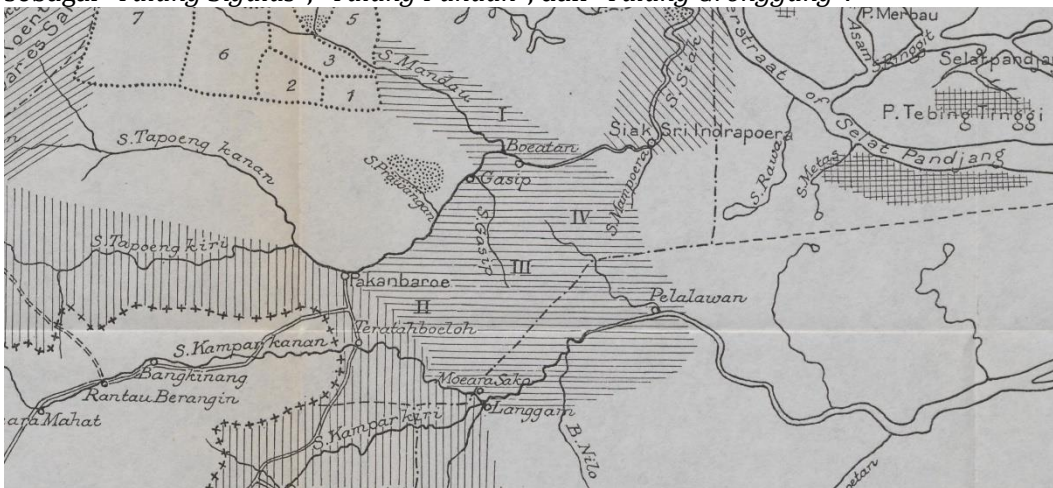
Petunjuk utama dari keterangan di atas adalah mengenai adanya kedudukan sebagai “*Datoe*”, asal-usul yang menyebutkan “*uit Priang Padang Pandjang (Priaman) afkomstig* (berasal dari Priang Padang Pandjang (Priaman))”, dan “*Deze vier personen worden als de stamvallers van Siak’s vorspronkelijke bevolking beschouwd* (Keempat individu ini dianggap sebagai nenek moyang dari populasi asli)”.

Petunjuk pertama mengenai keberadaan kata “*Datoe*” dalam keterangan Rijn van Alkemade mengindikasikan bahwa “*Datoe Merpoesoer*”, “*Datoe Sai*”, “*Datoe Kelantan*” dan “*Datoe Merbadak*” memiliki hubungan dengan kebudayaan yang menjadi warisan Kadatuan Sriwijaya. Istilah “*Datoe*” atau “*Dātu*”¹⁰ dikenal di seluruh wilayah dalam hegemoni Sriwijaya, diantaranya seperti Sumatera, Semenanjung Malaka, Kalimantan Bagian barat, Kepulauan Sulu di Filipina dan lainnya. Penggunaan kata “*Datoe*” atau disebut juga “*Datuk*” merupakan istilah pemimpin peninggalan dari sistem kepemimpinan sejak masa kadatuan Sriwijaya yang juga masih dapat ditemukan kembali di masa-masa berikutnya dalam berbagai sistem pemerintahan kerajaan-kerajaan pewaris wilayah Sriwijaya.

Kemudian, petunjuk kedua mengenai keterangan mengenai asal-usul mereka dari “*Priang Padang Pandjang (Priaman)*”, pada dasarnya sangat membingungkan, oleh sebab Pariangan (*Priang*) yang terletak di dekat Padang Panjang (*Padang Pandjang*) merupakan wilayah yang berbeda lokasi dengan Pariaman (*Priaman*). Rijn van Alkemade mungkin tidak menyadari perbedaan lokasi dari Pariangan, Padang Panjang, dan Pariaman oleh sebab ia tidak kesana dan hanya mengumpulkan informasi dari masyarakat di Siak. Selain itu, tidak tertutup kemungkinan bahwa, dalam ingatan kolektif dari informan Rijn van Alkemade, ketiga lokasi tersebut memang dianggap sebagai satu wilayah.

Petunjuk ketiga mengenai “*Deze vier personen worden als de stamvallers van Siak’s vorspronkelijke bevolking beschouwd* (Keempat individu ini dianggap sebagai nenek moyang dari populasi asli)”, merupakan landasan untuk menentukan bahwa “*Deze vier personen* (Keempat individu ini)” yang terdiri atas “*Datoe Merpoesoer*”, “*Datoe Sai*”, “*Datoe Kelantan*” dan “*Datoe Merbadak*” merupakan leluhur dari penduduk di sepanjang Sungai Siak yang kemudian, jika disesuaikan lokasi mereka dengan peta Tideman yang digambar berdasarkan peta Moszkowski, dikenal sebagai “orang talang”.

Orang talang di sepanjang Sungai Siak terdiri atas “*Talang Mandau*”, “*Talang Koetip*”, “*Talang Gasip*” dan “*Talang Dajoen*”. Talang Gasip kemudian menurunkan suku-suku yang kemudian dikenal sebagai “*Talang Sigalas*”, “*Talang Pandan*”, dan “*Talang Gronggang*”.¹¹



Gambar 2. Lokasi Talang dalam peta Tideman yang digambar berdasarkan peta Moszkowski. Wilayah Talang ditunjukkan dalam bentuk garis horizontal dengan angka Romawi. (I) Talang Mandau, (II) Talang Koetip, (III) Talang Gasip, (IV) Dajoen.

Sumber: Tideman, "Land En Volk Van Bengkalis," 1935.

¹⁰ “*Dātu*” berasal dari bahasa Proto-Malayo-Polynesian yang berarti leluhur, kepala, atau bangsawan. Lihat: Bellwood, et al., *The Austronesians*, 11.

¹¹ Rijn van Alkemade, “Het Rijk Gassip,” 221-2.

Kemudian Rijn van Alkemade memaparkan keberadaan kerajaan kuno yang disebutnya sebagai Kerajaan Gasip sebagai berikut:

Deze soekoe's breidden zich langzamerhand uit, vooral de soekoe Gassip, die de voornaamste schijnt te zijn geweest; de ontwikkeling dezer streken, die daarvan het gevolg was, trok de aandacht van een vorstentelg uit Priang Padang Pandjang. Yam toean Belang, gelijk de overlevering dien anak-radja noemt, begaf zich naar de soengei Gassip, waar de soekoe Gassip verblijf hield en een versterking bezat, die Kota Merangei heette. Daar hij uit dezelfde negari als de vier soekoe's af komstig was, bestond er tusschen beide een zekere band, en niet veel moeite kostte het Yam toean Belang, om weldra veel invloed en grooten aanhang te verkrijgen, waarvan het gevolg was dat de vier soekoehoofden hem tot hun vorst uitriepen. Hij werd alzoo Radja van Gassip en hield zijn verblijf in de Kota Merangei.¹²

Suku-suku ini berangsur-angsur berkembang, terutama suku Gassip, yang tampaknya paling penting; Perkembangan yang dihasilkan dari daerah-daerah tersebut menarik perhatian seorang keturunan kerajaan dari Priang Padang Pandjang. Yam tuan Belang, sebagaimana tradisi menyebutnya anak-raja, pergi ke sungei Gassip, tempat tinggal suku Gassip dan memiliki benteng yang disebut Kota Merangei. Karena dia berasal dari negari yang sama dengan keempat suku, ada ikatan tertentu di antara keduanya, dan tidak banyak masalah bagi Yam tuan Belang, untuk segera mendapatkan banyak pengaruh dan banyak pengikut, yang mengakibatkan empat kepala suku memproklamasikannya sebagai penguasa mereka. Dengan demikian ia menjadi Raja Gassip dan tinggal di Kota Merangei.

Pengangkatan “Yam toean Belang” sebagai raja oleh empat kepala suku sebagaimana disebutkan di atas menandai berdirinya kerajaan yang disebut Kerajaan Gasip di Sungai Siak. Selanjutnya, Rijn van Alkemade menjelaskan bahwa keberadaan Yam tuan Belang berhubungan erat dengan keberadaan kelompok suku lain yang disebut dengan nama Suku Sakai, sebagaimana yang dipaparkannya sebagai berikut:

Tegelijk met Yam toean Belang waren vier doebalangs, Radja Padjang, Lebé Pandjang (diens zoon), Nè [3] Dondong en Nè Katoelangan genaamd, naar Gassip gekomen. Aan beide laatstgenoemden werd met hunne volgelingen, bekend onder den naam van orang sakai [1], de tegen woordige talang Gassip als woonplaats aangewezen [2]. Deze orang sakai nu hadden, om de eene of andere reden, zich de ongenade van den vorst op den hals gehaald, zoodat zij genoodzaakt waren uit te wijken en naar de andere zijde van de Siak-rivier te vluchten. De door hen aldus verlaten grond werd toen weggegeven aan de soekoe Gassip, die door den vorst gelast werd om die streek te bewonen en te bebouwen. De orang sakai vestigden zich eensdeels in boven-Mandau en Koenta (Kota-Inten), anderdeels aan de soengei Prawang. Hoewel later weder door den vorst in genade aangenomen, durfden de orang sakai niet weder uit hunne schuilplaatsen terugkeeren en trokken zij zich meer en meer terug in het binnenland, waar zij tot op den huidigen dag in hunne bosschen een zwervend leven leiden. Diegenen evenwel, die naar de soengei Prawang, een zijtak van de Siak-rivier, waren getrokken, bleven daar onder een hoofd, dat den titel van Batin Prawang verkreeg [3].¹³

Bersama Yam tuan Belang ada empat dubalang, Raja Padjang, Lebé Pandjang (putranya), Nè [3] Dondong dan Nè Katoelangan, datang ke Gassip. Dua yang terakhir, dengan para pengikutnya, yang dikenal dengan nama orang sakai [1], talang Gassip saat ini ditetapkan sebagai tempat tinggal [2]. Sekarang orang sakai ini, karena satu dan lain hal, menimbulkan ketidaksukaan raja, sehingga mereka terpaksa mengalah dan melarikan diri ke seberang Sungai Siak. Tanah yang ditinggalkan oleh mereka kemudian diberikan kepada suku Gassip, yang diperintahkan oleh raja untuk menghuni dan mengolah wilayah itu. Orang sakai sebagian menetap di hulu Mandau dan Koenta (Kota-Inten), sebagian lagi di sungei Prawang.

¹² *Ibid*, 220.

¹³ *Ibid*, 220-1.

Meskipun kemudian disukai kembali oleh raja, orang sakai tidak berani kembali dari tempat persembunyian mereka, dan semakin mundur ke pedalaman, di mana hingga hari ini mereka menjalani kehidupan mengembara di hutan mereka. Namun, mereka yang telah pergi ke Sungei Prawang, anak sungai Siak, tetap tinggal di sana di bawah seorang kepala suku yang bergelar Batin Prawang [3].

Salah satu petunjuk penting dari informasi Rijn van Alkemade diatas yang harus diperhatikan adalah keberadaan nama "*Nè Dondong en Nè Katoelangan (Nè Dondong dan Nè Katoelangan)*" beserta para pengikut mereka yang kemudian disebut dengan "*Orang Sakai*". Rijn van Alkemade menjelaskan bahwa istilah "*Nè*" merupakan singkatan dari kata "*Nènèk*" yang juga dapat diartikan sebagai kakek.¹⁴ Istilah "*Nènèk*" dalam hal ini dimaksudkan untuk penyebutan leluhur (kakek).

Penggunaan istilah "*Nènèk*" untuk penyebutan leluhur juga ditemukan di suku asli Semenanjung Malaka, sebagaimana yang ditemukan Newbold (1839) pada suku yang dikenal sebagai "*Banua*".¹⁵ Ragam suku asli yang ada di Semenanjung Malaka, termasuk *Banua* yang disebutkan oleh Newbold, kadang kala secara umum disebut dengan istilah "*sakai*".¹⁶

Adanya penggunaan istilah "*sakai*" untuk menyebutkan masyarakat kuno di bagian hulu Sungai Mandau, jika dihubungkan penduduk lainnya yang disebut "*talang*" di sekitar Sungai Siak, merupakan petunjuk awal yang membuktikan bahwa istilah "*sakai*" bukanlah istilah yang berkonotasi negatif. Namun, istilah tersebut berhubungan secara khusus dengan latar belakang sejarah dari masyarakat di bagian hulu Sungai Mandau itu sendiri. Untuk itu, penelusuran kata "*sakai*" untuk masyarakat di bagian hulu Sungai Mandau haruslah difokuskan untuk menjawab pertanyaan mengapa masyarakat ini tidak menggunakan istilah "*talang*" sebagai identitas mereka, sebagaimana halnya dengan berbagai komunitas masyarakat yang ada disekitar mereka.

Petunjuk untuk menemukan jawaban mengenai perbedaan identitas masyarakat di bagian hulu Sungai Mandau dengan komunitas masyarakat disekitarnya mungkin dapat ditelusuri berdasarkan keterangan Rijn van Alkemade tentang "*Tegeljik met Yam toean Belang waren vier doebalangs (Bersama Yam tuan Belang ada empat dubalang)*". Keterangan ini menunjukkan bahwa "*Nè Dondong*" dan "*Nè Katoelangan*" beserta para pengikutnya yang kemudian disebut "*orang sakai*" memiliki asal usul yang sama dengan "*Yam toean Belang*", yakni berasal dari Priang Padang Pandjang. Artinya, lokasi asal-usul "*orang sakai*" sama dengan asal-muasal leluhur "*talang*". Namun hal yang perlu diperhatikan dalam catatan Rijn van Alkemade adalah mengenai siapa yang terlebih dahulu berdomisili di kawasan Sungai Siak. Dalam hal ini, sesuai catatan Rijn van Alkemade, leluhur "*talang*" lebih dahulu mendiami Siak daripada leluhur "*orang sakai*".

Jabatan "*Nè Dondong*" dan "*Nè Katoelangan*" dalam informasi Rijn van Alkemade disebut sebagai "*doebalangs*" atau dalam bahasa Melayu disebut ulubalang¹⁷ (hulubalang) yang berfungsi sebagai kepala pasukan. Keterangan mengenai "*Aan beide laatstgenoemden werd met hunne volgelingen...* (Dua yang terakhir, dengan para pengikutnya..)" menunjukkan bahwa leluhur "*orang sakai*" bukan hanya "*Nè Dondong*" dan "*Nè Katoelangan*", tetapi termasuk juga para "*volgelingen (pengikut)*" yang menyertai kedua tokoh ini. Hal ini berarti istilah "*orang sakai*" memiliki makna yang berhubungan dengan status mereka ketika "*Yam toean Belang*" mendirikan kerajaan Gassip, yakni sebagai kalangan prajurit atau ksatria.

Jika etimologi "*sakai*" dihubungkan dengan kata Sanskerta सखा (*sakhā*, nomina untuk lelaki) atau सखि (*sakhi*, nomina untuk perempuan) yang memiliki arti teman, rekan atau pedamping,¹⁸ maka terlihat jelas makna "*sakai*" untuk "*orang sakai*" kemungkinan besar berasal dari bahasa Sanskerta dan bukan bahasa asli dari rumpun Melayu (*Proto-Malayo-Polynesian*). Etimologi "*sakai*" berasal dari bahasa Sanskerta telah dipaparkan oleh peneliti sebelumnya, beberapa diantaranya seperti Wilkinson Skeat dan Bladgen (1906) yang merujuk kepada catatan Grunwedel (1893), Couillard (1983), dan Porath

¹⁴ *Ibid*, 220, fn. 3.

¹⁵ Newbold, *Political and statistical account, Vol. II.*, 376, 394.

¹⁶ Skeat dan Bladgen, *Pagan Races*, vol. I, 22.

¹⁷ Wilkinson mengartikan "ulubalang" sebagai seorang prajurit atau seorang petugas. Wilkinson, *A Malay-English Dictionary*, 60.

¹⁸ Wiktionary, "sakhā (सखा)."; Wiktionary, "sakhi (सखि)."; Windows Library, "Shakhi, Sakhi, Sakhī, Śākhi, Śākhin, Shakhin: 31 definitions."

(2018). Dalam perspektif bahasa Melayu, selain memiliki makna untuk identitas untuk penduduk asli, Wilkinson (1901) juga memaparkan makna Sakai sebagai pengikut, pelayan atau keluarga (*followers, retainers, dependents*).¹⁹

Bahasa Sanskerta merupakan salah satu bahasa utama dalam Kadatuan Sriwijaya, namun penggunaannya kemungkinan hanya bersifat eksklusif yang hanya berlaku dalam lingkaran pusat kekuasaan Kadatuan Sriwijaya dan tidak dijalankan di dalam pemerintahan lokal pada kawasan-kawan yang menjadi mandalanya.²⁰ Eksklusifitas ini sebagaimana dapat dilihat dalam Prasasti Sabokingking (Prasasti Telaga Batu) yang menguraikan istilah jabatan dalam Kadatuan Sriwijaya. Istilah yang disebutkan dalam prasasti tersebut di dominasi dengan bahasa Sanskerta, seperti yang dapat dilihat dalam keterangan Hermann Kulke (1993) sebagai berikut:

At the top of this hierarchy stood the ruler of Śrīvijaya. He was followed by the crown prince (yuvarāja), the second crown prince (pratiyuvarāja), and royal princes (rājakumāra). According to the inscription they had been invested by the ruler of Śrīvijaya "with the charge of a Dātu, you who protect all the provinces of my empire" (line 20). They are followed by princes of royal blood (rājaputra), local rulers (bhūpati), army commanders (senāpati), officers (nāyaka), secretaries (pratyaya), royal confidants (hāji pratyaya), court officers (dandanāyaka), "surveyor of groups of workmen" (tuhā an vatak = vuruh), "surveyor of low castes" (addhyāksī nijavarna) cutlers (vāsikarana), princely officers (?) (kumārāmātmya), regular and irregular soldiers (cātha-bhata), administrators (adhikarana), clerks (kāyastha), architects (sthāpaka), naval captains (puhāvam), traders (vaniyāga), customs officers (?) (pratisāra), royal washermen (marsī hāji), and royal slaves (hulun hāji) (lines 3-5).²¹

Di puncak hierarki ini berdiri penguasa Śrīvijaya. Dia diikuti oleh putra mahkota (*yuvarāja*), putra mahkota kedua (*pratiyuvarāja*), dan pangeran kerajaan (*rājakumāra*). Menurut prasasti mereka telah dilantik oleh penguasa Śrīvijaya "dengan tugas seorang *Dātu*, Anda yang melindungi semua provinsi kerajaan saya" (baris 20). Mereka diikuti oleh pangeran dari darah bangsawan (*rājaputra*), penguasa lokal (*bhūpati*), komandan tentara (*senāpati*), perwira (*nāyaka*), sekretaris (*pratyaya*), kepercayaan kerajaan (*hāji pratyaya*), petugas pengadilan (*dandanāyaka*), "surveyor of kelompok pekerja" (*tuhā an vatak = vuruh*), "surveyor dari kasta rendah" (*addhyāksī nijavarna*) pemotong (*vāsikarana*), perwira pangeran (?) (*kumārāmātmya*), tentara reguler dan tidak teratur (*cātha-bhata*), administrator (*adhikarana*), juru tulis (*kāyastha*), arsitek (*sthāpaka*), kapten angkatan laut (*puhāvam*), pedagang (*vaniyāga*), petugas bea cukai (?) (*pratisāra*), tukang cuci kerajaan (*marsī hāji*), dan budak kerajaan (*hulun hāji*) (baris 3-5).

Sidauruk (2022) menjelaskan bahwa fenomena istilah jabatan dalam pemerintahan Kadatuan Sriwijaya yang didominasi bahasa Sanskerta kemungkinan bermaksud untuk menunjukkan citra supranatural atau sakral para pejabat internal Kadatuan Sriwijaya dihadapan para *Dātu* dan Batin dari *sakala* (segala) *mandala* Sriwijaya.²² *Mandala* adalah sistem politik yang mengakar, diwariskan dan tersebar luas di kawasan Asia Tenggara sejak jaman prasejarah.²³ Istilah *mandala* berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti "lingkaran" dan merupakan sistem kekuasaan dimana penguasa lokal tetap memiliki kekuasaan dan pemerintahan yang mandiri namun mengakui dan tunduk kepada kekuasaan penguasa lain yang jauh lebih kuat daripadanya.

Kembali ke pembahasan mengenai etimologi istilah "*sakai*" dari kata Sanskerta सखा (*sakhā*) atau सखि (*sakhi*), berdasarkan pembahasan sebelumnya diatas, terdapat kemungkinan bahwa istilah tersebut merupakan sebutan sakral dalam sistem pemerintahan Kadatuan Sriwijaya untuk para teman atau sekutu yang mengakui kedaulatan Kadatuan Sriwijaya. Pengakuan tersebut dilakukan melalui

¹⁹ Wilkinson, *A Malay-English Dictionary*, 363.

²⁰ Sidauruk, *Jejak Waris Buluh Bohal*, 114.

²¹ Kulke, "Kadatuan Śrīvijaya," 160-161.

²² Sidauruk, *Jejak Waris Buluh Bohal*, 114.

²³ Chutintaranond, "Mandala," 90.

ikatan sakral (*sacred bond* atau *sacred oath* yang berarti sumpah suci),²⁴ ikatan yang biasanya berlangsung turun temurun. Dalam hal ini, "orang sakai" dapat diartikan sebagai identitas bagi para sekutu Kadatuan Sriwijaya terikat secara turun temurun secara sakral dengan para penguasa Kadatuan Sriwijaya dan para keturunan dari penguasa tersebut.

Adanya kata Sanskerta सखा (*sakhā*) atau सखि (*sakhi*) sebagai salah satu bentuk ikatan turun temurun secara sakral antara "orang sakai" dengan para penguasa Kadatuan Sriwijaya, mungkin dapat menjadi penjelasan mengapa tidak ada penolakan "orang sakai" terhadap kerajaan-kerajaan yang memiliki hubungan sebagai pewaris Kadatuan Sriwijaya. Sebagai misal kerajaan Siak Sri Indrapura yang menggunakan istilah Sanskerta श्री इन्द्रपुर (Sri Indrapura) untuk menunjukkan bahwa para raja di Siak masih merujuk kepada akar sejarah keturunannya kepada garis raja-raja Sriwijaya, sebab bahasa Sanskerta merupakan salah satu bahasa yang digunakan pada masa Kadatuan Sriwijaya.²⁵

IDENTIFIKASI NAMA MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pendefinisian identitas masyarakat adat yang dahulu berdomisili di kawasan bagian atas Sungai Mandau di Kabupaten Bengkalis masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli. Polemik utama terkait identitas ini adalah penggunaan istilah "sakai" yang secara umum diketahui oleh kalangan masyarakat sekitar yang menggunakan identitas sebagai Melayu. Istilah "sakai" kemudian menjadi istilah defenitif yang digunakan kerajaan Siak Sri Indrapura untuk membedakan masyarakat adat yang dahulu berdomisili di kawasan bagian atas Sungai Mandau dengan kelompok masyarakat lainnya di daerah sekitar yang memiliki adat berbeda.

Konteks identitas Melayu hanya digunakan secara eksklusif oleh kalangan masyarakat berbahasa Melayu yang telah memeluk agama Islam, sehingga masyarakat adat di kawasan bagian atas Sungai Mandau yang dimasa dahulu juga berbahasa Melayu namun belum memeluk agama Islam kemudian disebut atau dikenal dengan istilah "orang sakai". Ketika "orang sakai" mulai memeluk agama Islam pada sekitaran akhir abad ke-19, identitas sebagai "orang sakai" mulai mendapatkan penolakan oleh sebagian besar penduduk tempatan di kawasan bagian atas Sungai Mandau. Penolakan ini disebabkan banyaknya konotasi negatif dari kata "sakai" yang digunakan oleh masyarakat Melayu Muslim pada masa itu.

Kata "sakai" dengan konotasi negatif hingga sekarang masih sering dijumpai di kalangan masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Bengkalis maupun Kota Dumai, misalnya dalam kalimat "Sakai kali kau!" yang merupakan kalimat merendahkan yang bermakna bahwa orang yang disebut dalam kalimat tersebut tidak mengikuti perkembangan jaman. Contoh konotasi negatif lainnya dapat dilihat dalam pernyataan I.B. Mantra (1977) yang menyebutkan Sakai sebagai "suku terbelakang" sebagaimana dapat dilihat dalam pernyataannya berikut ini:

*Suku bangsa yang terdesak ini, dalam daerah penelitian terdapat di pedalaman Sungai Mandau, yaitu di Minas, Muara Basung dan sekitarnya, yang dikenal dengan nama suku "Sakai." Suku ini terkenal sebagai suku terbelakang, yang oleh Pemerintah (Departemen Sosial) sedang diusahakan memasyarakatkan mereka dengan mengadakan pemukiman-pemukiman di Muara Basung.*²⁶

Rekaman mengenai konotasi-konotasi negatif lainnya dari kata "sakai" juga banyak ditemukan dalam berbagai catatan peneliti di masa lalu.²⁷ Tidak satupun peneliti ini dapat menjelaskan mengapa kata "sakai" hanya digunakan bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu, misalnya masyarakat di kawasan bagian atas Sungai Mandau dalam Kerajaan Siak Sri Indrapura.

Masyarakat berbahasa Melayu non-Muslim lainnya pada kawasan yang berbeda di dalam Kerajaan Siak Sri Indrapura justru tidak disebut dengan istilah "orang sakai", namun dengan istilah-istilah yang berbeda, misalnya "orang hutan" untuk masyarakat non muslim di pedalaman pulau-pulau dari Pulau Bengkalis sampai Pulau Mendol, "orang akit" di Selat Morong Kepulauan Rupat, atau "orang

²⁴ Hall, *A History of Early Southeast Asia*, 17; Andaya, *Leaves of the Same Tree*, 55. Newbold mencatat keberadaan sumpah setia ini di kalangan Benua yang juga dikenal oleh Melayu Semenanjung Malaka sebagai "Sumpah Setia Berkacha-darah". Lihat: Newbold, *Political and Statistical Account*, Vol. II, 395.

²⁵ Lihat Sidauruk, *Jejak Waris Buluh Bohal*, 249-50.

²⁶ Mantra, et al., *Adat Istiadat Daerah Riau*, 27.

²⁷ Lihat Skeat dan Blagden, *Pagan Races*, vol. I, 14, 22, 528; Annandale dan Robinson, *Fasciculi Malayenses-Anthropology, Part I*, 47, 180; Dentan, *The Semai*, 2.

bonai” di Sungai Kubu. Perbedaan istilah untuk kalangan masyarakat berbahasa Melayu non-Muslim ini menunjukkan bahwa “orang sakai” pada awalnya bukan merupakan identitas yang merendahkan, namun merupakan identitas yang memiliki latar belakang asal usul yang spesifik terhadap keberadaan masyarakat di kawasan bagian atas Sungai Mandau dari Kerajaan Siak Sri Indrapura.

Istilah “sakai” sebagai identitas masyarakat tidak hanya ditemukan di kawasan bagian atas Sungai Mandau dalam kerajaan Siak Sri Indrapura yang ada di Sumatera, namun juga dapat ditemukan di daerah-daerah luar Sumatera. Di Semenanjung Malaka, istilah “sakai” juga digunakan untuk masyarakat melayu non muslim yang ada disana, tetapi sejak tahun 1960-an mereka disebut dengan istilah “orang asli”.²⁸ Selain itu, istilah “sakai” juga kadang kala ditemukan di beberapa kerajaan Melayu Islam di Kalimantan dengan fungsi yang sama dengan kerajaan Melayu Islam di Sumatera dan Semenanjung Malaka.²⁹

Keberadaan istilah “sakai” sebagai identitas di Sumatera, Semenanjung Malaka dan Kalimantan untuk menyebutkan kelompok masyarakat non muslim tertentu atau populasi berbasis hutan non-Muslim, merupakan petunjuk yang membuktikan bahwa istilah “sakai” memiliki latar belakang khusus yang belum dikaji secara mendalam oleh kalangan peneliti. Penggunaan istilah “sakai” jika ditinjau dalam metode keilmuan yang berbeda, misalnya dalam perspektif historioleksikal, dapat digunakan sebagai petunjuk untuk menemukan kemungkinan ragam fragmen sejarah dari masyarakat-masyarakat yang diidentifikasi sebagai “sakai”.

Identitas “sakai” untuk masyarakat di kawasan bagian atas Sungai Mandau di Kerajaan Siak Sri Indrapura pada masa lalu terlihat jelas dalam undang-undang kerajaan yang dikenal sebagai Kitab Bab-alkewa'id³⁰. Mengacu kepada kitab yang diterbitkan oleh Sultan Syarif Hasyim pada tahun 1898 ini, Sakai di Sungai Mandau dibagi atas dua suku, yakni suku “Batin Delapan Sakai” dan suku “Batin Lima Sakai”.³¹ Kitab Bab-alkewa'id dalam kerajaan Siak Sri Indrapura pada masa itu difungsikan sebagai peraturan mengenai kedudukan kepala pemerintahan, administrasi wilayah, hukum keadilan adat dan syarak, serta ragam perkara dan ketentuan adat lainnya yang tidak diatur dalam peraturan pemerintah Hindia Belanda (*Nederlandsche Hindie*) yang menjadi penguasa induk pada masa itu.

Adanya istilah “sakai” untuk mengidentifikasi masyarakat di bagian atas Sungai Mandau dalam Bab-alkewa'id pada tahun 1898 menunjukkan bahwa kata “sakai” merupakan identitas khusus yang diakui dalam Kerajaan Siak Sri Indrapura. Namun Porath (2018) menyebutkan bahwa Max Moszkowski (1909) dalam penelitiannya menegaskan nama “sakai” ditolak oleh masyarakat di bagian atas Sungai Mandau dan masyarakat ini menyebut dirinya sebagai “Orang Batin”.³² Porath kemudian menggunakan kata “pebatinan” untuk mengidentifikasi masyarakat di bagian atas Sungai Mandau, konsep yang sama juga digunakan oleh Sidauruk (2022) dengan istilah “suku pabatin” untuk mempermudah difrensiasi kelompok masyarakat adat ini dengan kelompok masyarakat adat lainnya.³³

Lalu bagaimanakah identitas yang tepat untuk mengidentifikasi masyarakat adat yang berasal dari bagian atas Sungai Mandau?

Jika mengacu kepada keberadaan istilah kata “sakai” dalam Bab-alkewa'id pada tahun 1898, menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat bagian atas Sungai Mandau merupakan suatu identitas khusus yang menjadi bagian dari ragam suku Melayu di kerajaan Siak Sri Indrapura. Identitas ini dapat dijadikan sebagai legalitas bagi masyarakat pada bagian atas Sungai Mandau, sebab Bab-alkewa'id merupakan aturan perundang-undangan yang berlaku di kerajaan Siak Indrapura, kerajaan yang kemudian melebur di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Istilah-istilah yang ada dalam ragam penelitian mengenai identitas masyarakat bagian atas Sungai Mandau merupakan istilah teknis untuk penelitian ilmiah yang digunakan sebagai sarana untuk membedakan keberadaan masyarakat ini dengan masyarakat-masyarakat lainnya. Hal ini bukan dimaksudkan bahwa istilah yang digunakan para peneliti tersebut salah, namun oleh sebab Bab-alkewa'id selain berfungsi sebagai kitab undang-undang dan juga berfungsi sebagai kitab acuan adat

²⁸ Nobuta, “Islamization Policy,” 481, Porath, “The Orang Batin,” 288.

²⁹ Porath, “The Orang Batin,” 288.

³⁰ Terdapat dua versi transliterasi kitab ini. Versi pertama dari Badan Pembina Daerah Provinsi Riau yang diterbitkan pada sekitar tahun 1970-an. Versi berikutnya diterbitkan oleh Bappeda Kabupaten Siak pada tahun 2014.

³¹ Jamil, *Bab - Alkewa'id*, 18.

³² Porath, “The Orang Batin,” 289.

³³ *Ibid*, 289; Sidauruk, *Jejak Waris Buluh Bohal*, 80.

bagi masyarakat melayu di Kerajaan Siak Sri Indrapura yang sekarang menjadi bagian dari Provinsi Riau, maka istilah yang digunakan dalam kitab tersebut perlu menjadi prioritas untuk mengidentifikasi ragam suku kuno di Provinsi Riau. Selain itu, Bab-alkewa'id juga memaparkan secara jelas nama-nama dari hinduk (sub-sub suku) yang termasuk dalam "Suku Batin Delapan Sakai" dan "Suku Batin Lima Sakai".

Kepala suku beserta para kepala hinduknya yang termasuk dalam Suku Batin Delapan Sakai dalam Bab-alkewa'id adalah sebagai berikut:

- (1) Batin Meradjo Lela kepala suku Batin Delapan Sakai,³⁴
- (2) Batin Beramban Sri Pauh Sakai, Hindok Sri Pauh,
- (3) Sutan Batuah Sakai, Hindok Sutan Batuah,
- (4) Batin Sebangar Sakai, Hindok Sebangai,
- (5) Batin Singa Meradja Sakai, Hindok Singa Meradja,
- (6) Batin Batuah Sakai, Hindok Batuah,
- (7) Batin Berumbung Sakai, Hindok Berumbung,
- (8) Batin Semunai Sakai, Hindok Semunai,
- (9) Beremban Petani, Hindok Beremban Petani.³⁵

Kedudukan kepala Suku Lima Sakai dalam Bab-alkewa'id dijabat oleh Penghulu Mandau yang sekaligus merupakan kepala suku Talang Mandau.³⁶ Hindok dari Suku Batin Lima Sakai diantaranya adalah sebagai berikut:

- (1) Batin Penasa Sakai, Hindok Penasa,
- (2) Batin Belutu Sakai, Hindok Belutu,
- (3) Batin Beringin, Hindok Beringin,
- (4) Batin Tenganau Sakai, Hindok Minas (Hindok Tenganau)³⁷,
- (5) Batin Beremban Minas, Hindok Minas.³⁸

Dalam dokumentasi awal mengenai keberadaan Sakai dari catatan Eropa pada abad ke-19, seperti Rijn van Alkamade dan Hijmans van Anrooij yang masing-masing menerbitkan tulisannya secara bersamaan pada tahun 1884, telah menyebutkan keberadaan kelompok masyarakat di Sungai Mandau dengan nama Sakai dan keberadaan Batin Lima dan Batin Selapan, yang dalam Bab-alkewa'id disebut sebagai Suku Batin Lima Sakai dan Suku Batin Delapan Sakai. Namun kedua penulis tersebut tidak bisa menyebutkan para batin yang menjadi sub-sub suku dari Batin Selapan atau Suku Batin Delapan Sakai.

Keterangan mengenai para batin yang termasuk Batin Selapan atau Suku Batin Delapan Sakai baru ditemukan dalam catatan Moszkowski (1909) yang menguraikan masing-masing batin tersebut sebagai berikut:

The name of the batin sĕlapan are batin Madjilelo, considered as a kind of primus inter pares, with the kampong Pingger and Grosam bĕsar, the batin borumban Pĕtani with the kampong Ayer gumai, the batin sutan Bertoa with the kampong Si-tupang, the batin Smunai, kampong Paoh kayu mungkup, the batin Sinangar, kampong Bansal, the batin Bertoa, kampong Lubu. These six stay on the left side of the Mandau; they take their names too from the corresponding rivers. On the right side are the settlements of the batin Singa mĕradja kampong Samsam and batin borumban sri Paoh, kampong Paoh.³⁹

Nama batin sĕlapan adalah batin Madjilelo, dianggap semacam *primus inter pares*, dengan kampong Pingger dan Grosam bĕsar, batin borumban Pĕtani dengan kampong Ayer gumai, batin sutan Bertoa dengan kampong Si-tupang, batin Smunai, kampong Paoh kayu mungkup, kampong batin Sinangar, kampong Bansal, kampong batin Bertoa, kampong Lubu. Keenam orang ini berada di sisi kiri Mandau; mereka mengambil nama mereka juga dari sungai yang

³⁴ Jamil, *Bab - Alkewa'id*, 18.

³⁵ Untuk daftar batin hindok, lihat *Ibid*, 19.

³⁶ *Ibid*, 18.

³⁷ Kemungkinan terjadi salah tulis oleh OK. Muhammad Jamil, seharusnya "Hindok Tenganau". Untuk koreksi lihat Jamil, *Bab al-Qawa'id*, 45-46.

³⁸ *Ibid*, 19.

³⁹ Moszkowski, "The Pagan Races of East Sumatra," 708.

sesuai. Di sebelah kanan adalah permukiman batin Singa mēradja kampong Samsam dan batin borumban sri Paoh, kampung Paoh.

Keterangan dari Moszkowski tersebut kemudian menjadi acuan awal bagi para peneliti Eropa di masa-masa berikutnya, sebagai misal Porath (2018) yang menyebutkan para batin dari Batin Selapan atau Suku Batin Delapan Sakai sebagai berikut:

*These were the Batin Selapan (the eight Batin), who were: Batin Paoh, Batin Batuah, Batin Sebanga, Batin Singa Meraja, Batin Berumbang, Batin Semunai, Batin Bramban, and Batin Pinggir.*⁴⁰

Batin Selapan (delapan Batin), yaitu: Batin Paoh, Batin Batuah, Batin Sebanga, Batin Singa Meraja, Batin Berumbang, Batin Semunai, Batin Bramban, dan Batin Pinggir.

Jumlah para Batin yang disebutkan oleh Moszkowski maupun Porath memiliki perbedaan yang mendasar dengan keterangan dalam Bab-alkewa'id. Moszkowski dan Porath menyebutkan jumlah batin dari Batin Selapan terdiri atas delapan batin, sedangkan dalam Bab-alkewa'id disebutkan bahwa jumlah batin di Suku Batin Delapan Sakai (Batin Selapan) berjumlah sembilan yang terdiri atas satu orang kepala suku Batin Delapan Sakai dan delapan batin dari masing-masing Hindoknya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Moszkowski maupun Porath tidak mengetahui keberadaan dokumen Bab-alkewa'id yang merupakan kitab undang-undang kerajaan Siak Sri Indrapura pada akhir abad ke-19 atau pada tahun 1898.

Uniknya, Moszkowski berpandangan bahwa dirinyalah yang pertama mengetahui nama para Batin dari Batin Selapan oleh sebab ia tidak menemukan secara jelas nama-nama tersebut dalam peta yang diperolehnya dari *Batavian Topographical Intitute (Topografische dienst in Nederlandsch-Indië)*.⁴¹ Moszkowski mengambil kesimpulan tersebut oleh sebab ia tidak menemukan nama para batin dari Batin Selapan dalam keterangan Rijn van Alkamade maupun keterangan Hijmans van Anrooij yang ditulis pada tahun 1884, kedua penulis terakhir ini hanya menyebutkan keberadaan *Batin Lima*. Namun jika meninjau kepada ke Bab-alkewa'id yang menunjukkan bahwa dokumen tersebut juga disahkan oleh Residen Hindia Belanda,⁴² yang artinya dokumen ini juga terdapat dalam arsip Pemerintah Hindia Belanda, maka terlihat jelas bahwa Moszkowski dalam penelitiannya tidak berkoordinasi atau mungkin tidak mendapatkan akses ke arsip pemerintah tempatan pada masa itu. Pemerintah tempatan, baik dari pemerintah Hindia Belanda maupun dari kerajaan Siak Sri Indrapura tidak mungkin tidak memiliki Bab-alkewa'id, sebab dokumen ini merupakan aturan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan kala itu. Selain itu, ketidaktahuan Moszkowski atas keberadaan Bab-alkewa'id juga menunjukkan bahwa ia dalam proses penelitiannya tidak pernah bertemu dengan salah satu dari para Batin yang disebutkan, sebab jika ia telah bertemu, ia pasti mengetahui keberadaan kitab Bab-alkewa'id yang merupakan pegangan utama bagi pada pejabat termasuk para Batin dari Suku Batin Delapan Sakai dan Suku Batin Lima Sakai di kerajaan Siak Sri Indrapura.

Merujuk kepada tahun dari catatan tertulis mengenai keberadaan Suku Batin Delapan Sakai dan Suku Batin Lima Sakai beserta para Batinnnya, maka keterangan tertulis dalam Bab-alkewa'id yang diterbitkan pada tahun 1898 haruslah dipandang sebagai dokumen yang paling akurat dan yang tertua dalam menguraikan identitas para batin dari Suku Batin Delapan Sakai dan Suku Batin Lima Sakai. Catatan Moszkowski diterbitkan pada tahun 1909 atau sebelas tahun kemudian setelah penerbitan Bab-alkewa'id.

Kemudian, Bab-alkewa'id merupakan dokumen resmi pemerintahan dan difungsikan untuk penyelenggaraan pemerintahan pada masa itu, sehingga untuk identitas Suku Batin Delapan Sakai dan Suku Batin Lima Sakai beserta para Batinnnya haruslah mengacu kepada keterangan dalam Bab-alkewa'id bukan berdasarkan keterangan Moszkowski.

Istilah yang digunakan oleh Bab-alkewa'id untuk masyarakat "Sakai" adalah "Suku Batin Delapan Sakai" dan "Suku Batin Lima Sakai" untuk membedakan dua kelompok masyarakat yang sebenarnya memiliki identitas dan budaya yang sama. Perbedaan tersebut lebih cenderung disebabkan

⁴⁰ Porath, "The Orang Batin," 292.

⁴¹ Moszkowski, "The Pagan Races of East Sumatra," 707-8.

⁴² Lihat Jamil, *Bab - Alkewa'id*, 3, 46.

oleh adanya latar belakang politik mengenai terpecahnya “Sakai” menjadi dua kelompok pemerintahan yang tunduk kepada penguasa yang berbeda.

Di satu sisi terdapat kelompok yang disebut “Suku Batin Delapan Sakai” sebagai kelompok yang dahulu tunduk kepada kerajaan Kota Intan. Di sisi lainnya adalah kelompok Suku Batin Lima Sakai yang mengakui kedaulatan kerajaan Siak Sri Indrapura.

Dalam proses identifikasi sebagai Masyarakat Hukum Adat, keberadaan penduduk dari keturunan masyarakat kuno “Sakai” yang dahulu berdiam di kawasan sekitar sungai mandau perlu diperjelas identitasnya yang dapat membedakan penduduk ini dengan ragam Masyarakat Hukum Adat lainnya yang ada di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia, misalnya di Malaysia. Untuk itu diusulkan penggunaan kata “Suku Batin Sakai” atau dapat juga disingkat sebagai “Batin Sakai” yang dikutip dari istilah dalam Bab-alkewa’id namun tanpa menggunakan kata “Delapan” dan Lima” sebagai wujud kesatuan identitas dari dua suku yang sebelumnya disebut sebagai “Suku Batin Delapan Sakai” dan “Suku Batin Lima Sakai”.

Kedua kelompok suku “Suku Batin Delapan Sakai” dan “Suku Batin Lima Sakai” pada dasarnya memiliki latar belakang yang sama baik dalam konteks kebudayaan, sejarah dan genealogi. Diversifikasi lebih disebabkan oleh adanya pergulatan politik dan dinamika sosial tempatan, namun tidak menghilangkan unsur-unsur budaya yang merupakan jejak identitas dari kedua suku tersebut.

Penggunaan istilah “Suku Batin Sakai” digunakan sebagai identitas pembeda antara masyarakat yang memiliki genealogi dengan masyarakat kuno di Sungai Mandau dengan ragam masyarakat (etnik) lainnya yang juga memiliki identitas menggunakan kata “sakai” untuk memperjelas bahwa Suku Batin Sakai memiliki latar belakang sejarah yang berbeda dengan etnik Sakai lainnya. Latar belakang sejarah ini akan dipaparkan lebih lanjut dalam kajian yang akan kami publikasikan di masa mendatang.

KESIMPULAN

Identitas sebagai “Sakai” di masyarakat Suku Batin Sakai seringkali disalahpahami sebagai penghinaan bagi masyarakat tersebut. Konotasi negatif yang disematkan dalam konteks “sakai” merupakan salah satu hal yang perlu diluruskan ayau diperbaiki. Konotasi tersebut menyebabkan banyak distorsi dalam ingatan masyarakat tempatan sekaligus merupakan pelecehan terhadap masyarakat yang pada dasarnya memiliki sejarah dan kebudayaan unik dalam rangkaian peradaban manusia.

Sakai dalam sejarah merupakan identitas khusus bagi para sekutu dalam hegemoni Kadatuan Sriwijaya yang secara sakral terikat turun temurun dengan para penguasa dan para keturunan penguasa dari Kadatuan tersebut. Sebagai sekutu dari Sriwijaya dan para keturunannya, Sakai tidak sepenuhnya tunduk kepada Kadatuan Sriwijaya dan tetap memiliki kebebasan dalam menjalankan kehidupan dan mempertahankan kebudayaannya sendiri secara turun temurun. Hal inilah yang menjelaskan mengapa di masa lalu, khususnya pada masa kerajaan-kerajaan Islam yang dahulu merupakan bagian dari Kadatuan Sriwijaya, identitas “Sakai” dapat ditemukan bagi kelompok masyarakat yang *resist* terhadap perubahan budaya namun tetap mengakui kedaulatan para penguasa masa itu.

Dalam proses identifikasi masyarakat hukum adat yang ada di bagian atas Sungai Mandau, selanjutnya diusulkan untuk menggunakan istilah “Suku Batin Sakai” sebagai nama identitas bagi masyarakat tersebut, nama yang merupakan singkatan untuk menyatukan Suku Batin Delapan Sakai dan Suku Batin Lima Sakai sebagaimana sebelumnya tercantum dalam Bab-alkewa’id beserta seluruh hinduk yang dahulu bersatu di kedua kelompok dari Suku Batin Sakai tersebut. Namun penggunaan identitas sebagai “Suku Batin Sakai” perlu terlebih dahulu mendapatkan kesepakatan dari antara masyarakat yang menjadi keturunan dari Suku Batin Sakai. Jika istilah “Suku Batin Sakai” tidak disepakati, maka sebaiknya istilah lama “Suku Batin Delapan Sakai” dan “Suku Batin Lima Sakai” yang tercantum dalam Bab-alkewa’id untuk menunjukkan bahwa jejak sejarah maupun identitas masyarakat Suku Batin Sakai adalah jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. Samad. *Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu)-Edisi Pelajar*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, versi E-Book. Diunduh tahun 2019, dari <http://nahdlatululama.id>, 2008.
- Andaya, Leonard Y. *Leaves of the Same Tree-Trade and Ethnicity in the Straits of Melaka*. Honolulu: University of Hawai’i Press, 2008.

- Annandale, Nelson dan Herbert C. Robinson. *Fasciculi Malayenses: Anthropological and Zoological Results of an Expedition to Perak and the Siamese Malay States, 1901-1901-Anthropology, Part I*. London, New York, dan Bombay: Published for the University Press of Liverpool by Longmans, Green & Co., 1903.
- Bellwood, Peter, James J. Fox and Darrell Tryon, eds. *The Austronesians: Historical and Comparative Perspectives*. Canberra: ANU E Press, 2006.
- Chutintaranond, Sunait. "Mandala," "Segmentary State" and Politics of Centralization in Medieval Ayudhya." *Journal of the Siam Society*, 78, 1 (1990): 89-100.
- Cortesão, Armando, ed. *The Suma Oriental of Tome Pires an Account of the East, from the Red Sea to Japan, written in Malacca and India in 1512-1515 and the Book of Francisco Rodrigues Rutter of A Voyage in the Red Sea, Nautical Rules, Almanack and Maps, Written and Drawn in The East Before 1515*. London: Hakluyt Society, 2 vols., 1944.
- Dentan, Robert Knox. *The Semai: A Non-Violent People of Malaya*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1968.
- Hall, Kenneth R. *A History of Early Southeast Asia-Maritime Trade and Societal Development, 100-1500*. Lanham: Rowman & Little Field Publishers, Inc., 2011.
- Hijmans van Anrooij, H.A. 1885. "Nota Omtrent Het Rijk van Siak." *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde*, 30, (1885): 259-390.
- Jamil, Muhammad. *Bab-Alkewa'id*. Naskah diterbitkan oleh Badan Pembina Kesenian Daerah Provinsi Riau tanpa menerakan angka tahun terbit.
- Jamil, Nizami. *Bab al-Qawa'id*. Siak: Bappeda Kabupaten Siak, 2014.
- Kulke, Hermann. "Kadātuan Śrīvijaya" – Empire or kraton of Śrīvijaya? A Reassessment of the Epigraphical Evidence." *Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-Orient*. Tome 80, (1993): 159-180.
- Mantra, I.B., Astrid S. Susanto, Sagimun M.D, Rifai Abu, Anrini Sofiun, Junus Melalatoa, Meutia Swasono, Rosmalawati, Gatot Murniatmo, Nelly Tobing, Sjamsidar, Endang Parwieningrum. *Adat Istiadat Daerah Riau*. Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977.
- Marsden, William. *The History of Sumatra, Containing an Account of the Government, Laws, Customs, And Manners of the Native Inhabitants, with A Description of The Natural Production*. London: Printed for the Author, by J. M'Creery, Black-Horse-Court, and sold by Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, Paternoster-Row, 1811.
- Mediacenter Riau. "Keinginan Masyarakat Adat Suku Sakai Bathin Sobanga Menjaga Hutan Membuahkan Hasil". Diunduh tahun 2024, dari mediacenter.riau.go.id.
- Moszkowski, M. "The Pagan Races of East Sumatra." *Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland*, 41, 3 (July, 1909): 705-720.
- Newbold, T. J. *Political and Statistical Account of the British Settlements in the Strait of Malacca, Vol. II*. London: John Murray, 1839.
- Nobuta, Toshihiro. "Islamization Policy toward the Orang Asli in Malaysia." *Bulletin of the National Museum of Ethnology*, 31, 4 (2007): 479-495.
- Porath, Nathan. "The Orang Batin/Orang Sakai in the Malay Kingdom of Siak Sri Indrapura." *Asian Ethnology*, 77, 1-2 (2018): 285-305.
- Rijn van Alkemade, J. A. van. "Het Rijk Gassip." *Tijdschrift van het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap*, 2, 2 (1885): 218-239.
- Sidauruk, Freddy Hasiholan. Jejak Waris Buluh Bohal Negeri Bukit Batu-Fragmen Sejarah Dari Era Mandala Śrīvijaya Sampai Ke Kerajaan Siak Sri Indrapura. Salinan Terbatas. Unpublished. 2022.
- Skeat, Walter William dan Charles Otto Blagden. *Pagan Races of The Malay Peninsula*. Vol. I. London: Macmillan and Co., Limited; New York: The Macmillan Company, 1906.
- Wiktionary. "sakhā (सखा)." Diunduh tahun 2024, dari <https://en.wiktionary.org/wiki/sakhā>.
- Wiktionary. "sakhi (सखि)." Diunduh tahun 2023, dari <https://en.wiktionary.org/wiki/sakhi>.
- Wilkinson, R. J. *A Malay-English Dictionary*. Hongkong, Shanghai and Yokohama: Kelly & Walsh, 1901.